

# PERANAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM KASUS PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL DAN PT. PERTAMINA

Supriyanto

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membuktikan adanya persekongkolan tender saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan perkara penjualan atau divestasi unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero). Serta mengetahui peranan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung terhadap putusan persekongkolan tender kasus PT. Indomobil Sukses Internasional dan PT. Pertamina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, negara hukum adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder, yang dikualifikasikan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini dirumuskan Majelis Komisi dalam perkara penjualan saham PT. IMSI dan Majelis Komisi dalam perkara divestasi VLCC PT. Pertamina sama-sama memutuskan bahwa pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli. perkara penjualan saham PT. IMSI dan perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, dapat disimpulkan bahwa peranan Pengadilan Negeri terhadap dua perkara tersebut tidak hanya memeriksa substansi/pokok perkara. Dari aspek *legal reasoning* Majelis Hakim menafsirkan UU Antimonopoli secara limitative, dan juga mengacu kepada ketentuan perjanjian jual beli yang diatur dalam BW. Sedangkan dalam perkara divestasi VLCC PT. Pertamina, Majelis Hakim menyamakan pembuktian unsur “diskriminasi” dalam Pasal 19 huruf d dan unsur “bersekongkol” dalam Pasal 22 UU Antimonopoli. Begitu juga halnya dengan pembuktian unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, yang ada dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU Antimonopoli. Saran yang diberikan adalah rumusan Pasal 22 UU Antimonopoli direvisi menjadi yakin “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender”. Penggunaan kata “yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” tidak perlu dicantumkan, karena KPPU akan kesulitan membuktikan unsur tersebut. Kata tersebut mengandung pendekatan *rule of reason*, dimana persyaratan pendekatan *rule of reason* diawali dengan pengukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait. Dan secara logika, tidak ada kemungkinan bahwa persekongkolan tender tidak akan mengakibatkan persaingan usaha yang sehat, dan dapat dipastikan bahwa apabila terjadi persekongkolan tender, maka pasti akan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

**Kata Kunci** : persekongkolan tender

# **ROLE OF THE JUDGE'S DECISION ON TENDER CONSPIRACY CASE IN CASE PT. INDOMOBIL INTERNATIONAL SUCCESS AND PT. PERTAMINA**

**Supriyanto**

## **Abstrak**

This study was conducted to determine and assess the role of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in proving the existence of bid rigging shares. Indomobil Sukses International and the case of sale or divestiture tankers (VLCC) owned by PT Pertamina (Persero). As well as determine the role of the District Court and judges of the Supreme Court against the decision of conspiracy tander case PT. Indomobil Sukses Internasional and PT. Pertamina. The theory used in this research is the theory of the state law, the state is a state law that uphold the supremacy of the law to uphold truth and justice, and there is no power which is not accounted for. The method used is a normative juridical research, the study of documents with the use of secondary data, which qualified on primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.

The results of this study are formulated Council of the Commission in the case of the sale of shares PT.IMSI and the Commission Council in case the divestment of VLCC PT.Pertamina both decided that businesses found to have violated Article 22 of the Antimonopoly Law. case PT.IMSI stock sales and divestment case VLCC PT. Pertamina, it can be concluded that the role of the District Court against the two cases are not only examining the substance / principal case. From the aspect of legal reasoning Antimonopoly Law Judges interpret as limitative, and also refers to the provisions of the purchase agreement were set in BW. Whereas in the case of divestment VLCC PT. Pertamina, the judges equate proving the element of "discrimination" in Article 19 paragraph d and the element of "conspiring" in Article 22 of the Antimonopoly Law. So is the case with elements of proof "resulting in unfair competition", under Article 19 letter d and Article 22 of the Antimonopoly Law. Advice given is the formulation of Article 22 of the Antimonopoly Law was revised to believe "Businesses are prohibited from conspiring with others to govern the tender". The use of the word "which may result in unfair competition" are necessary, because the Commission would have difficulty proving that element. The word contains a rule of reason approach, where the requirements of the rule of reason approach begins with the measurement of market share and forms related markets. And logically, there is no possibility that the tender conspiracy will not lead to healthy competition, and it is certain that in case of bid rigging, it will inevitably result in unfair business competition.

**Keywords:** bid rigging